

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat:

Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya

Sonedi

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
sonedi.lilik@gmail.com

Zulfa Jamalie

IAIN Antasari Banjarmasin
zuljamlie@gmail.com

Majeri

MTs. Darul Ulum Palangka Raya
majerialya@yahoo.com

Abstract

This study aims to describe the budget plan of income and expenditure of schools, the allocation of educational financing, the supervision of education financing, and the reporting of education financing originating from parents in MTs Darul Ulum Palangkaraya. This research uses qualitative descriptive research method, conducted in MTs Darul Ulum Palangka Raya. Data collection techniques through observation, interview and documentation. The results of this study reveal that the Madrasah Budget Plan in MTs Darul Ulum Palangkaraya has been made through prior planning by the madrasah before meeting with foundations, school committees and parents, although the draft budget is made in the form of The simplest. In the case of the use of parents' funds, the learners are in accordance with the needs and RAPBM made, in the sense that the accounting has been made accounting. Furthermore, supervision of financial management is done directly by the principal.

Key word: *Management, Education Financing*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu upaya mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas, diperlukan adanya dukungan dan peran serta dari semua pihak terutama yang menyangkut masalah pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena segala kegiatan

pendidikan tentu memerlukan dana atau biaya. Biaya pendidikan bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, terutama pada saat tahun ajaran baru.

Penyediaan dana pendidikan dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam UU No. 20 tahun 2003 bab XIII pasal 46 ayat 1 tentang tanggung jawab pendanaan disebutkan bahwa: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Kemudian dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 tentang sumber pendanaan pendidikan disebutkan bahwa: Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Selama ini dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah relatif sangat terbatas jumlahnya. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana APBN dalam bidang pendidikan menjadi kendala besar dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional yang berkualitas, termasuk pendidikan Madrasah Swasta. Hal ini sejalan dengan pernyataan Zubaidi: “Dari sekian permasalahan yang ada dalam pendidikan Islam diantaranya adalah masalah kekurangan dana dan minimnya fasilitas pendidikan”, oleh sebab itu masalah biaya pendidikan seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi perlu adanya optimalisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber pada lingkungan pendidikan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat di dalamnya. Sebagaimana tertuang dalam pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 bahwa: Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.²

Oleh sebab itu selain memberikan dukungan sumber pembiayaan, masyarakat juga memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV Pasal 54 ayat 1 dan 2 :

*Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.*³

Berdasarkan UU tersebut, maka masyarakat berhak untuk mengetahui pendayagunaan biaya yang telah disumbangkan kepada lembaga pendidikan baik tingkat efektivitas maupun tingkat efisiensinya. Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, sangatlah luas dan terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dan dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan terutama

¹Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006 h. 31

²*Ibid*, h. 8

³*Ibid*, h. 35

pendidikan di Madrasah Swasta, baik dalam aspek pemikiran yang terkait dengan kebijakan Madrasah, maupun peran serta dalam hal fisik material. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa secara terbuka dan transparan. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, pembelanjaan anggaran, pengawasan dan pelaporan pembiayaan.

Transparan dapat dipahami sebagai keterbukaan, artinya dalam pengelolaan keuangan sekolah dibutuhkan adanya keterbukaan. Keterbukaan tersebut menyangkut keterbukaan sumber-sumber penerimaan sekolah, jumlah dana yang dikelola sekolah, serta pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah tersebut. Melalui keterbukaan, akan mampu menimbulkan kepercayaan dari *stakeholder* sekolah, antara lain pemerintah, masyarakat luas, orang tua siswa, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lainnya. Keterbukaan ini penting, misalnya dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja Madrasah (RAPBM), dimana informasi mengenai RAPBM dapat dengan mudah untuk diakses dan dikritisi.⁴

Firdaus dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem pembiayaan yang efektif dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup lembaga pendidikan swasta. Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari peserta didik merupakan potensi besar dalam melaksanakan manajemen pendidikan serta merupakan modal bagi keberlangsungan pendidikan. Sistem pengelolaan dan manajemen penggalian dana pembiayaan pendidikan supaya difokuskan pada upaya strategi kemitraan.⁵

Harsono, pembiayaan pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah, biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa, biaya pendidikan yang bersumber dari sponsor dan perusahaan serta biaya pendidikan yang bersumber dari lembaga pendidikan itu sendiri.⁶

Mengingat pentingnya peran pembiayaan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola pembiayaan yang baik dalam penganggaran pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut dengan manajemen pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan pendidikan, banyak masalah yang muncul yaitu, minimnya anggaran pendidikan, penyimpangan dalam penyaluran dana pendidikan, dan alokasi dana yang belum memadai.

Pembiayaan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain.⁷ Komponen-komponen pembiayaan pendidikan terutama di madrasah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah

⁴Donni Juni Priansa & Rismi Somad, *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung, Alfabeta, 2014, h. 143

⁵ Rachman Firdaus, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Mutu Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Swasta*. (Studi kasus pada Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella di Bandung). Bandung, UPI, 2004.

⁶ Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta, 2007, h. 9

⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rusada Karya, 2004, h. 47
FENOMENA, Volume 9, No 1, 2017

diatur, direncanakan, dan dipergunakan secara baik dan tepat sasaran dan kebutuhan. Kenyataan yang ada, sebagian besar lembaga pendidikan Madrasah Swasta saat ini masih menerapkan pola-pola manajemen yang sangat sederhana dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat/orang tua.⁸

Salah satu diantara Madrasah Swasta yang masih menerapkan pola-pola manajemen yang sangat sederhana dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat/orang tua adalah MTs Darul Ulum Palangka Raya.

Berdasarkan observasi awal oleh peneliti berkenaan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua (iuran Madrasah), diketahui pengelolaan dana tersebut belum dimanajemen secara maksimal dari proses pembuatan perencanaan penggunaannya, realisasi penggunaannya, pengawasan oleh pihak terkait dan pelaporan.⁹

MTs Darul Ulum Palangka Raya didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum. Madrasah ini mempunyai peran yang cukup besar dalam mensukseskan program pemerintah wajib belajar 9 tahun di Kota Palangka Raya. Lokasi lembaga pendidikan ini sangat strategis, karena berada di tengah kota. Keberadaannya dengan beberapa Madrasah/SMP Negeri dan Swasta lainnya yaitu, SMP Islam Nurul Ihsan, MTs Islamiyah dan MTsN-1 Model Palangka Raya. Posisi yang strategis ini merupakan tantangan berat bagi sebuah Madrasah Swasta untuk tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat/orang tua. Oleh sebab itu MTs Darul Ulum Palangka Raya selalu melakukan perbaikan kualitas manajemen secara terus menerus, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan terutama yang bersumber dari masyarakat/orang tua.

MTs Darul Ulum Palangka Raya telah meraih peringkat Akreditasi "A", karena telah melakukan upaya peningkatan kualitas pada beberapa aspek, seperti sarana dan prasarana pendidikan, proses pembelajaran, pelayanan sekolah, sumber daya manusia mulai dari kepala Madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan.

Selanjutnya yang menarik adalah pada pendaftaran siswa baru tahun Pelajaran 2014/2015 MTs Darul Ulum Palangka Raya masih mendapatkan siswa sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni tiga rombongan belajar. Sehingga sampai pada akhir tahun 2015 jumlah siswa keseluruhan ada 305 siswa. Hal tersebut membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada lembaga pendidikan ini. Untuk itu MTs Darul Ulum Palangka Raya selalu berupaya untuk memperbaiki sistem manajemen pendidikan, terutama yang berkaitan dengan sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 1) Bagaimana perencanaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) Tahun Pelajaran 2015/2016 di MTs Darul Ulum Palangka Raya dirumuskan?; 2) Bagaimana realisasi dan pembukuan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya?; 3) Bagaimana pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul

⁸ Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta.

⁹ Observasi awal peneliti terhadap manajemen pengelolaan pembiayaan pendidikan bersumber dari orang tua pada tanggal 10 September 2015.

Ulum Palangka Raya?; 4) Bagaimana laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya? Selanjutnya tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Untuk mendeskripsikan tentang Rencana Anggaran Pendapatan Madrasah (RAPBM) terhadap pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya; 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana pengalokasian pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya; 3) Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya; 4) Untuk mengetahui bagaimana pelaporan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya.

B. Kajian Pustaka

Stoner dan Freeman, manajemen adalah suatu proses perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas.¹⁰ Pendapat lain Engkoswara dan Ann Komariah, memberikan definisi : Manajemen adalah merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan kemampuan, keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun bersama orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif dan efisien.¹¹ Menurut William Springel, *Management is that function of an interprise which concerns with the direction business and control of the various activities to attain the business objectives*. Dia memandang manajemen sebagai kegiatan perusahaan (yang mestinya dapat diterapkan bagi kegiatan non perusahaan juga), dan manajemen dipandang sebagai fungsi perusahaan berupa pemberian pengarahan dan pengendalian bermacam-macam kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.¹²

Terry memberikan definisi : *Management is a distinct prose is consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber manusia dan sumber lain.¹³

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian dan pengarahan serta pengawasan dalam mengorganisasi anggota dan mempergunakan seluruh sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan

¹⁰ Muhammad Rohman dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan (Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif)*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2012, h.2

¹¹ *Ibid...*, h. 2

¹² Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Rosda Karya, 1994, h. 59

¹³ Terry G.R., *Principles of Management*, Homewood, Richard D Irwin, INC, 1977, h. 4
FENOMENA, Volume 9, No 1, 2017

secara efektif dan efisien. Manajemen dapat juga dipahami sebagai proses kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam manajemen ada tiga unsure penting yaitu, 1) ada usaha kerjasama, 2) ada dua orang atau lebih, dan 3) untuk mencapai tujuan tertentu atau yang telah ditetapkan.

Biaya dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan biaya pendidikan dapat diartikan sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan.¹⁴

Dadang Suhardan dkk, menyatakan, pembiayaan pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.¹⁵

Harsono, secara singkat menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.¹⁶

Pembiayaan pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis yaitu:

1. Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
2. Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa;
3. Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa;
4. Pembiayaan pendidikan dari lembaga pendidikan itu sendiri.¹⁷

Biaya dalam pendidikan terdiri dari: biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).¹⁸ Biaya langsung terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan belajar bagi peserta didik, berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah atau orang tua maupun peserta didik sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatanyang hilang dan dikorbankan oleh peserta didik selama belajar.

Manuel Zmyman dalam Muhammad Rohman dan Sofan Amri mengemukakan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumbernya saja, tetapi juga penggunaan dana-dana secara efisien.¹⁹

Pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang direncanakan, dikelola dan diorganisir secara baik dan tepat sasaran akan menunjang terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan sekolah/madrasah.²⁰ Mekanisme pembiayaan pendidikan dapat dilakukan melalui

¹⁴ Nanang Falah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung, PT. Remaja Rosada Karya, 2009, h. 112

¹⁵ Dadang Suhardan, dkk, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2012, h. 22

¹⁶ *Ibid.*, h. 9.

¹⁷ *Ibid.*, h. 10.

¹⁸ *Ibid.*, h. 23.

¹⁹ Muhammad Rohman & Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan*., h. 268.

²⁰ *Ibid.*, h. 10.

berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan, alternatif dan efektifitas. Pendekatan sistem dalam pembiayaan pendidikan dimulai dengan penerapan PPBS (*Planning Programming Budgeting Systems*) atau yang dikenal dengan istilah Sistem Penyusunan Program dan Anggaran (SIPPA).²¹ Pengelolaan terhadap pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya sistem manajemen yang baik, dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus berkaitan dengan suatu manajemen pendidikan.

Pendekatan sistem, ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu unsur eksternal yang mencerminkan suatu subsistem lingkungan yang lebih luas, dan unsur internal yang menggambarkan sistem itu sendiri. Subsistem eksternal mengandung masalah-masalah umum, sedangkan subsistem internal mencakup perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, administrasi program dan pengawasan program.²²

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa : “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik”.

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu adanya keterbukaan. Keterbukaan ini menyangkut keterbukaan tentang sumber penerimaan, jumlah pembiayaan yang diperoleh, sistem pengelolaan, pengawasan dan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut.

Secara umum pembiayaan (*financing*) adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja dan merencanakan kebutuhan masa datang akan uang.²³

Selanjutnya sumber pembiayaan atau sumber keuangan sekolah/madrasah secara garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga sumber, sebagaimana diungkapkan oleh Sulistyorini yaitu :

- a. Pemerintah, baik pusat atau daerah yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukan bagi kepentingan pendidikan.
- b. Orang tua Peserta didik.
- c. Masyarakat, baik mengikat atau tidak.²⁴

Manajemen pembiayaan merupakan segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah/madrasah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen

²¹ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta Cet. I, 2014, h. 1.

²² *Ibid.*, h. 2.

²³ Kompri, *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*, Bandung, CV ALFABETA, 2014, h. 225.

²⁴ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 131.

pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), dan pemeriksaan (*auditing*).²⁵

Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana. Dalam pendidikan anggaran (*budget*) diartikan sebagai RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di sekolah.²⁶

Proses penyusunan anggaran di sekolah sangat sederhana dan kepala sekolah dapat melaporkan secara sederhana. Format yang digunakan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) meliputi : 1) sumber pendapatan antara lain SPP/Uang Komite Sekolah, uang pembangunan, 2) pengeluaran untuk kegiatan pembelajaran, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembangunan gedung dan sumber belajar, serta honorarium dan kesejahteraan.²⁷ Penganggaran yang bersifat rencana dan dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memajukan lembaga pendidikan, karena setiap lembaga pendidikan sangat memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya, apalagi sekolah/madrasah swasta, maka anggaran harus disusun dan digunakan secara baik dan terarah.

Semua dana atau pembiayaan pendidikan yang diterima, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua siswa dan masyarakat, harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penganggaran yang direncanakan, dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena faktor perubahan yang mempengaruhi, yaitu biaya pendidikan selalu naik seperti kenaikan barang-barang yang sebelumnya tertulis dalam anggaran, jumlah kebutuhan yang meningkat, dalam hal ini strategi penyusunan anggaran harus lebih cermat dan teliti.

“Pembukuan merupakan kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan meliputi dua hal yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, kepengurusan ini disebut kepengurusan ketatausahaan. Kepengurusan yang menyangkut pengelolaan keuangan yaitu penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan uang yang dikenal dengan istilah bendaharawan”.²⁸

Pembukuan merupakan kegiatan mengorganisir keuangan. Bendahara dalam tugasnya melaksanakan pembukuan serta mengontrol keuangan, mulai dari uang masuk sampai dengan uang keluar, sehingga transparansi keuangan pengelolaan keuangan makin jelas dan terorganisasi dengan baik.

Pemeriksaan (*auditing*) merupakan semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan

²⁵ Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta, UNY Press, 2009. h. 8

²⁶ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta, Aditya Media, 2008. h.3

²⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah...* h. 174

²⁸ *Ibid.*, h. 318

²⁸ *Ibid.*, h.320

uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang.²⁹ Nanang Fattah mengungkapkan paling tidak ada 4 (empat) pihak yang manfaat dari *auditing* yaitu 1) bagi bendaharawan, 2) bagi lembaga yang bersangkutan, 3) bagi atasan, 4) bagi yayasan dan komite sekolah.³⁰

Beberapa karya ilmiah yang menginspirasi kami melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nuri Alfaf dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa manajemen keuangan sekolah yang dilakukan oleh yayasan, sehingga keuangan dikontrol bendahara yayasan, dimana bendahara yayasan mempercayakan pengelolaan keuangan kepada unit-unit yang ada di dalam yayasan tersebut.³¹

Muhajirin, dalam penelitiannya memaparkan bahwa seluruh pembiayaan pendidikan yang bersumber dari partisipasi masyarakat harus dikelola dengan sistem manajemen yang baik. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan transparansi, efektifitas pengeluaran yang harus disusun dengan baik dan cermat.³²

Nasta'in Ahmad dalam penelitiannya berjudul manajemen pembiayaan pendidikan melalui program bos dalam meningkatkan mutu madrasah ibtdaiyah salafiyah tanjung sari tersono Batang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui dana Bos dalam meningkatkan mutu Madrasah harus dilaksanakan dengan cara transparan dan terencana baik perencanaan, penganggaran, penggunaan dan pengawasannya.³³

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi alat utama adalah manusia (*human tool*) artinya peneliti sendiri sebagai instrumen (*key instrument*).³⁴ Kehadiran peneliti di lokasi penelitian untuk meningkatkan intensitas peneliti berinteraksi dengan sumber data guna mendapatkan informasi yang lebih valid dan abash tentang fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus, hal ini sesuai dengan pernyataan memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya yaitu studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana: batasan-batasan antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dan di mana: multisumber bukti dimanfaatkan.³⁵

²⁹ *Ibid.*, h.321

³⁰ *Ibid.*, h.322

³¹ Nuri Alfaf, Manajemen Keuangan Yayasan Pondok Masjid Madrasah Wathoniyah Islamiyahdi Kebarongan Kemrabjen Banyumas Jawa Tengah. *Skripsi Fakultas Dakwah*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.

³² Muhajirin, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dari Partisipasi Masyarakat*, <http://Journal.Unnes.ac.id/sju/index.php/eduman>. vol 1 No. 02, 2012.

³³ Nasta'in Ahmad, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bos dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjung Sari Tersono Batang*, Semarang, IAIN Wali Songo, 2012

³⁴ Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. (3rd Edition), Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1982

³⁵ Yin, R.K. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Terjemahan oleh M. Djuazi Mudzakir. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsamawiyah (MTs) Darul Ulum Palangka Raya. Alasan dipilihnya MTs Darul Ulum Palangka Raya sebagai tempat penelitian didasarkan pada keunikan, menarik dan merupakan salah satu MTs swasta yang ada di Kota Palangka Raya yang menjadi tanggungjawab kepemilikan melalui Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum.

Milles dan Huberman menyatakan bahwa dalam menggunakan *purposif sampling technique* yaitu untuk memilih sampel berdasarkan kelompok, wilayah atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada.³⁶ Sedangkan Guba dan Lincoln mengatakan bahwa seorang yang dijadikan informan kunci hendaknya memiliki pengetahuan dan informasi atau dekat dengan situasi yang terjadi difokus penelitian.³⁷ Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Yayasan, Kepala MTs Darul Ulum, Ketua Komite MTs Darul Ulum dan Bendahara Komite sebagai kunci Informan (*key informan*), sementara informan lainnya adalah wakil kepala MTs bagian kurikulum, Humas, Sarana dan prasarana, kesiswaan, guru dan kepala TU.

Teknik pengumpulan data yang sesuai dan relevan dengan fokus dan tujuan penelitian, maka dilakukan dengan menggunakan tiga teknik yaitu: (1) wawancara mendalam (*indepth interviewing*), (2) observasi partisipasi (*participant observation*), dan (3) Studi Dokumen (*study of document*).³⁸ Milles & Huberman mengungkapkan melalui tiga alur (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi data. Ketiga langkah ini merupakan alur analisis untuk membuat data menjadi bermakna. Ketiganya merupakan satu kesatuan dan proses yang saling berulang secara interaktif serta dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data.³⁹

D. Temuan

1. Perencanaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) Tahun Pelajaran 2015/2016 di MTs Darul Ulum Palangka Raya

Dalam kegiatan manajemen, perencanaan berarti keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses menyusun anggaran belanja madrasah bagi orang yang mengetahui semua unsur organisasi. Keberhasilan perencanaan sangat menunjang keberhasilan kegiatan manajemen secara keseluruhan.

Secara sederhana *planning* (perencanaan) berarti merencanakan segala sesuatunya terlebih dahulu, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Menurut Kamal Muhammad Is dalam Husnul Yaqin, perencanaan adalah suatu pemikiran yang mantap terhadap suatu pekerjaan yang akan dilakukan, agar bentuk

³⁶ Miles, B.M., & Heiberan, A.M. *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*. (Beverly Hills: Sage Publication, Inc.1992)

³⁷ Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. *Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Result Through Responsive and Naturalistiv Approaches*. San Fransisco. (California: Jossey-Bass Inc., Publishers. 1985)

³⁸ *Ibid...*

³⁹ *Ibid...*

dan tahapan pelaksanaannya dapat berjalan menurut garis yang telah ditentukan dengan jelas, baik sasaran maupun caranya.⁴⁰

Sejalan dengan teori di atas, Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Palangka Raya melalui kepala madrasah dan wakil kepala madrasah membuat rencana anggaran tahunan yang memuat jumlah pemasukan dan pengeluaran atau belanja selama satu tahun. Draf yang dibuat tersebut dibawa dalam rapat, seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah dalam wawancara dengan peneliti berikut:

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) dibuat terlebih dahulu oleh Kepala Madrasah bersama Wakamad dengan memperkirakan dana yang akan diterima orang tua siswa. Setelah itu baru dimusyawarahkan dengan pihak Yayasan dan Komite Madrasah. Hal ini memudahkan nantinya pada saat musyawarah sudah ada acuan, tinggal menerima masukan dan saran dari pihak Yayasan dan Komite. Dengan demikian, semua pihak merasa dilibatkan dan bertanggung jawab terhadap rencana dan program madrasah.⁴¹

Senada dengan hal tersebut, Wakamad Bidang Kesiswaan MTs Darul Ulum Palangka Raya mengatakan :

*Betul, kami dari pihak Madrasah sudah menyiapkan RAB sebelum rapat dengan pihak Pengurus Yayasan dan Pengurus Komite. Bahkan terkadang pada saat rapat dan musyawarah, banyak yang menyerahkan kepada pihak Madrasah.*⁴²

Selanjutnya bendahara Komite MTs Darul Ulum Palangka Raya yang menyatakan :

*Ya, sebelum kami mengadakan rapat dengan pihak Yayasan dan Komite, pihak Madrasah sudah membahas terlebih dahulu sumber dana yang akan diterima khususnya dari orang tua siswa (komite) yang akan direncanakan untuk kegiatan operasional Madrasah.*⁴³

Dalam tahun pelajaran 2015/2016, MTs Darul Ulum Palangka Raya diperkirakan akan menerima dana yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa sebesar Rp. 128.100.000, dengan asumsi 305 siswa x 35.000 x 12 bulan.

Berdasarkan hasil observasi mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016, selama ini pelaksanaan pembuatan RAPBM dibuat terlebih dahulu pihak Madrasah sebagai kerangka acuan perencanaan pada saat dilaksanakan rapat dengan pihak Yayasan dan Komite Madrasah.⁴⁴

⁴⁰ Husnul Yaqin, *Kapita Selekta Administrasi..*, h. 9

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Murjani, Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Palangka Raya di ruang kerja, pada pukul 12.30 Wib tanggal 13 Mei 2016.

⁴² Wawancara dengan Ali Subakir, Wakamad Bidang Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Palangka Raya di ruang guru, pada pukul 10.30 Wib tanggal 15 Mei 2015.

⁴³ Wawancara dengan Sulhiyati, Bendahara Komite Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Palangka Raya di ruang guru, pada pukul 12.30 Wib tanggal 15 Mei 2015.

⁴⁴ Observasi terhadap pelaksanaan pembuatan RAPBM Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum pada tanggal 6 Mei 2016

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa RAPBM di MTs Darul Ulum Palangka Raya sudah dibuat melalui perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak madrasah sebelum dilaksanakan rapat bersama yayasan, komite sekolah dan orang tua, walaupun rancangan anggaran yang dibuat dalam bentuk yang sederhana.

2. Realisasi dan Pembukuan Pembiayaan Pendidikan yang Bersumber dari Orang Tua Siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016.

Realisasi dan pembukuan keuangan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa ini, Bapak Murjani mengatakan:

*Semua uang yang masuk dari pembayaran komite dicatat oleh bendahara, begitu juga terhadap pengeluarannya. Apakah itu untuk keperluan pembelian ATK maupun pembayaran honor sesuai yang ada dalam RAPBM atau keperluan lain yang tidak termasuk dalam RAPBM.*⁴⁵

Pernyataan tersebut, sependapat dengan bendahara komite Madrasah sebagaimana terungkap dalam kutipan wawancara berikut :

*Saya selaku bendahara, selalu berusaha mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran biaya pendidikan yang bersumber dari iuran siswa dalam buku kas serta mengumpulkan bukti-bukti seperti kwitansi sebagai dokumentasi dan dapat dilihat di dalam buku kas kami,.. pak.*⁴⁶

Semua data yang disampaikan oleh kedua sumber tersebut, peneliti melihat adanya keselarasan dengan beberapa dokumen pembukuan yang dimiliki oleh Bendahara Komite Madrasah. Adapun untuk pengeluaran yang sifatnya tidak terduga maka dalam hal ini bendahara komite menjelaskan :

*Kalau ada biaya pengeluaran yang diperlukan Madrasah, maka pihak kami akan mengeluarkannya, tetapi dengan syarat mendapat persetujuan dari kepala Madrasah, serta memberikan bukti pengeluaran tersebut.*⁴⁷

Dari pernyataan di atas diketahui untuk realisasi pengeluaran pembiayaan pendidikan di luar RAPBM, maka pihak komite bisa mengeluarkan dana tersebut dengan ketentuan telah mendapat persetujuan dari kepala Madrasah tanpa melalui permohonan secara tertulis.

3. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan Yang Bersumber dari Orang Tua Siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya.

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Murjani, Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Palangka Raya di ruang kerja, pada pukul 10.00 Wib tanggal 16 Mei 2016.

⁴⁶Wawancara dengan Sulhiyati, Bendahara Komite Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Palangka Raya di ruang kepala, pada pukul 10 Wib tanggal 16 Mei 2016.

⁴⁷Wawancara dengan Sulhiyati, Bendahara Komite Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Palangka Raya di ruang kepala, pada pukul 10 Wib tanggal 16 Mei 2015.

Pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa pada anggaran Tahun Pelajaran 2015/2016 di MTs Darul Ulum Palangka Raya, nampaknya hanya dilaksanakan oleh internal Madrasah. Hal ini disampaikan oleh bendahara Komite MTs Darul Ulum Palangka Raya yang memberikan penjelasan sebagai berikut

Pengawasan terhadap dana atau pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa dipantau secara terus-menerus oleh Kepala Madrasah, beliau selalu menanyakan apakah siswa rutin membayar komite setiap bulan?..dan apakah laporan penggunaan dana sudah disiapkan atau belum.⁴⁸

Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal, dalam hal ini Pengurus Yayasan dan Pengurus Komite tidak melakukan pengawasan. Penjelasan ini diperoleh dari Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Ulum Palangka Raya yang disampaikan dalam kutipan wawancara berikut :

Ya, kami dari Pengurus Yayasan maupun Pengurus Komite tidak melakukan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan dana atau pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa. Kami percaya kepada pihak Madrasah karena sudah ada RAPBM nya.⁴⁹

Dalam hal ini proses pengawasan oleh Yayasan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak madrasah. Hal senada disampaikan oleh Bapak Iman Syaefudin, Ketua Komite MTs Darul Ulum Palangka Raya sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut :

Betul, kami tidak melakukan pengawasan secara langsung, karena penggunaan dana sudah dialokasikan dalam RAPBM yang telah disepakati bersama. Kami yakin pihak Madrasah dapat mengelola dana tersebut untuk menunjang kegiatan operasional Madrasah.⁵⁰

Berdasarkan informasi tersebut di atas, menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap dana atau pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya, tidak dilakukan oleh pihak yayasan, komite, dan hanya dilakukan oleh pihak Madrasah.

Adapun hasil pengamatan terhadap proses pengawasan ini memang benar adanya bahwa fungsi pengawasan pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh

⁴⁸Wawancara dengan Sulhiyati, Bendahara Komite Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Palangka Raya di ruang guru, pada pukul 10.00Wib tanggal 20 Mei 2016.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak H.Syamsuri, Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Ulum Palangka Raya di ruang Kepala Madrasah, pada pukul 09.00 Wib tanggal 22 Mei 2016.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Iman Syaefudin, Ketua Komite Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Palangka Raya di ruang guru, pada pukul 10.00 Wib tanggal 22 Mei 2016.

kepala Madrasah, dalam hal ini pihak yayasan maupun pihak komite menyerahkan sepenuhnya.⁵¹

Berdasarkan hasil keseluruhan data yang peneliti kumpulkan diketahui bahwa proses pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa seluruhnya diserahkan kepada pihak Madrasah (kepala Madrasah).

4. Laporan Penggunaan Pembiayaan Pendidikan Yang Bersumber Dari Orang Tua Siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya.

Penyusunan laporan penggunaan dana atau biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa, Kepala Madrasah Swasta Darul Ulum Palangka Raya mengatakan :

Kami menyusun laporan berdasarkan bukti dan data penggunaan keuangan yang dicatat oleh bendahara. Terkadang ada penggunaan dana yang tidak termasuk dalam rencana kegiatan Madrasah. Hal semacam ini biasanya ada keperluan yang tak terduga-duga..⁵²

Terkait dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/Orang tua siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya, peneliti menemukan bentuk laporan, yaitu dalam bentuk rekapitulasi realisasi penggunaan dana atau pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa selama satu Tahun Pelajaran 2015/2016.⁵³

Berdasarkan data keseluruhan yang peneliti kumpulkan pada laporan penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016 diketahui dalam pembuatan laporan bendahara mengacu pada catatan pengeluaran yang dibuat sebagai bahan laporan, termasuk dalam hal bukti catatan pengeluaran dana tidak terduga.

E. Pembahasan

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016 yang telah dirumuskan oleh pihak Madrasah dengan pihak Yayasan dan Komite, nampaknya telah memenuhi tuntutan pemerintah seperti yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab XV Bagian Ketiga Pasal 56 ayat 1 dan 3 tentang peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah yang berbunyi:

⁵¹Observasi pelaksanaan pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Palangka Raya Tahun Tahun Pelajaran 2015/2016

⁵²Wawancara dengan Bapak Murjani, Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Palangka Raya di ruang kerja, pada pukul 10.30 Wib tanggal 1 Juni 2016.

⁵³Observasi dan pengumpulan data dokumen LPJ penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya tahun pelajaran 2015/2016.

Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Madrasah. Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁵⁴

Senada dengan UU tersebut, Al-Qur'an telah memberikan tuntunan tentang pentingnya suatu perencanaan, hal ini nampak terlihat dalam QS. Al-Hasyr : 18 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ^{١٨}

Artinya:

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

Perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin juga dipraktekkan oleh MTs Darul Ulum. Dalam perencanaan keuangan Madrasah MTs Darul Ulum dibawah pimpinan kepala Madrasah melakukan perencanaan dengan memperhatikan berbagai pihak yang kemudian dikaji dan pada akhirnya nanti disusun terlebih dahulu sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah(RAPBM) pada saat rapat dengan pihak yayasan dan komite.

Perencanaan pembiayaan di Madrasah sebagian besar masuk dalam penyusunan RAPBM yang disusun secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Fattah bahwa dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas.⁵⁶ Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan yang sistematis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 48: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.⁵⁷

MTs Darul Ulum Palangka Raya dalam menyusun rencana anggaran dan belanja Madrasah (RAPBM) pada prakteknya selalu dilakukan dengan

⁵⁴Ibid..., h. 72.

⁵⁵QS. Al-Hasyr [59] : 18

⁵⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h. 26.

⁵⁷Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006, h. 31.

musyawarah yang dihadiri kepala Madrasah, guru, yayasan, dan komite. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Langkah ini sangat relevan dengan salah satu prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an, yaitu prinsip bersifat demokratis sebagai berikut:

Manajemen demokratis bermakna bahwa, semua harus dimusyawarahkan bersama semua yang terlibat, seperti siswa, orang tua, yayasan dan lain sebagainya, mereka harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.⁵⁸

Pelaksanaan tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan Harjanto dalam Baihaqi bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁵⁹

Sementara itu proses penyusunan perencanaan pembiayaan, Madrasah telah sepenuhnya melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam perencanaan pembiayaan Madrasah sebagaimana yang diungkapkan Mulyasa bahwa dalam perencanaan pembiayaan Madrasah mencakup dua kegiatan yaitu penyusunan dan pengembangan RAPBS.⁶⁰

Dalam pelaksanaannya pihak Madrasah melakukan perencanaan pembiayaan pendidikan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran dalam penyusunan anggaran yang menganut prinsip pembagian wewenang dengan memberikan tugas kepada bendahara Komite untuk mengelola pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua.

Pelaksanaan perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh bendahara komite dalam hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Fattah bahwa :

Anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam manajemen organisasi, adanya sistem akuntansi yang memadai, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, adanya dukungan dari pelaksana.⁶¹

Akan tetapi dalam pelaksanaan musyawarah, kepala Madrasah dan para wakilnya belum melakukan perencanaan secara maksimal, dengan memperhatikan tiga aspek perencanaan berikut ini:

- a. Seyogyanya perencanaan pembiayaan pendidikan oleh kepala Madrasah dan para wakilnya melakukan kajian terhadap program-program yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan. Program-program yang direncanakan harus berdasarkan visi, misi dan memperhatikan keadaan Madrasah serta kemungkinan yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini penting karena perencanaan yang tidak berdasarkan visi misi akan menjadikan program yang disusun tidak sesuai dengan yang diinginkan Madrasah. Sedangkan apabila program yang disusun tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya terjadi

⁵⁸*Ibid.*, h. 23

⁵⁹Baihaqi, *Manajemen Pembiayaan pada SMKN Aceh Besar, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Volume1, No.2, November 2012, h. 40

⁶⁰E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 56.

⁶¹Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka Bai Quraisy, 2007, h. 26.

pada Madrasah, maka akan membuat perencanaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak mendapat dukungan dari sumber daya Madrasah. Adapun perencanaan yang tidak memperkirakan masa yang akan datang akan berakibat tidak akan mendapat dukungan pada tahun-tahun berikutnya

- b. Perencanaan pengeluaran. Perencanaan yang dilakukan kepala Madrasah dan para wakilnya pada tahap selanjutnya adalah perencanaan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan Madrasah dalam melaksanakan program-programnya. Perencanaan pengeluaran di MTs Darul Ulum Palangka Raya berdasarkan pada kemungkinan kemampuan Madrasah, sedangkan kemampuan keuangan Madrasah tergantung pada penerimaan dan pengeluaran yang masuk pada tahun anggaran.
- c. Perencanaan pendapatan, kepala Madrasah dan para wakilnya merencanakan penerimaan dan pengeluaran yang mungkin masuk ke Madrasah melalui berbagai segi dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Madrasah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan program yang disusun Madrasah. Untuk itu target penerimaan dana yang bersumber dari orang tua seharusnya menjadi prioritas Madrasah.

Ketiga aspek pelaksanaan perencanaan ini merupakan hasil kajian peneliti dari manajemen perencanaan yang diungkapkan oleh Ibrahim Bafadal bahwa manajemen perencanaan itu dibuat orang yang memahami organisasi, perencanaan yang didasarkan pada kenyataan nyata untuk masa kini dan masa depan serta dilakukan secara rinci dan teliti. Dalam pelaksanaannya manajemen perencanaan itu harus dibuat secara sederhana, luwes, dan praktis dan dibuat secara bersama untuk direkomendasikan pada pimpinan tertinggi.⁶²

Berdasarkan teori tersebut, maka pertimbangan 3 aspek perencanaan yang belum terlaksana secara maksimal oleh pihak Madrasah, maka peneliti berpendapat bahwa manajemen perencanaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya cukup baik. Sudah ada beberapa aspek yang dilakukan sejalan dengan teori-teori terdahulu, walaupun dalam membuat perencanaan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak terlepas dari pelaksanaan dan kebutuhan-kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.

Realisasi pembiayaan pendidikan secara umum bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Strategi pengalokasian pembiayaan pendidikan guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana tersebut. Pendekatan efisiensi ini dilakukan dengan tujuan mengantisipasi keterbatasan dalam anggaran, prinsip ini dikenal sebagai prinsip dasar dalam manajemen dalam pembiayaan sekolah ketika terjadi keterbatasan dalam sumber daya yang ada mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh didalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Penggunaan anggaran memperhatikan azas umum pengeluaran Madrasah, yaitu pemanfaatan penggunaan uang Madrasah minimal harus sama, apabila uang tersebut dipergunakan oleh pengelola Madrasah.

⁶²Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2006, h. 43.

Adapun temuan dalam Realisasi Anggaran dan Pembukuan Pembiayaan Pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016 bahwa pelaksanaannya pihak komite bertugas sebagai pengatur apabila ada uang yang masuk baik dari siswa, serta bertugas mengatur pengeluaran untuk dialokasikan kepada masing-masing bidang pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam program kegiatan di RAPBM.

Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di MTs Darul Ulum dalam prosesnya melakukan berbagai perundingan mengenai hasil dari RAPBM. Sebelumnya RAPBM dibuat oleh pihak Madrasah dengan membuat rancangan kebutuhan-kebutuhan program yang telah dibuat dan juga program yang membutuhkan tambahan biaya. Dalam realisasi dan pembukuan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua memiliki bendahara komite tersendiri, tidak digabungkan dengan biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah (BOS, BSM). Secara garis besarnya realisasi anggaran pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Palangka Raya melakukan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan terhadap dana pendidikan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sulistyorini yang menyatakan bahwa:

Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.⁶³

Pendapat di atas sudah melekat dan telah dilaksanakan oleh bendahara, hanya saja bentuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran tidak diklasifikasikan terutama dalam pencatatan pengeluaran, hal ini dianggap perlu agar mudah melakukan pengawasan serta keperluan dalam pelaporan yang akan datang.

Pengawasan Anggaran Pendidikan dalam sebuah manajemen manapun tidak akan pernah lepas dengan pengawasan atau yang kita kenal dengan *controlling*. Secara istilah pengawasan ini bermakna suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan dari sebuah program yang telah dicanangkan untuk melihat ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Abduraahman dalam Husnul Yaqin

Pengawasan merupakan kegiatan atau proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.⁶⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka fungsi dan peran pengawasan sangat penting, demi tercapainya tujuan program yang telah dituangkan dalam

⁶³Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta : Teras, 2009, h. 135.

⁶⁴Husnul Yaqin, *Kapita selekta Administrasi...*, h. 17-18

perencanaan. Dalam kaitannya pelaksanaan pengawasan realisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di sekolah maupun madrasah harus melibatkan semua unsur, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kompri, bahwa:

Pengawasan anggaran merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar dan penyelewengan lainnya.⁶⁵

Berkaitan hal tersebut di atas, maka menurut peneliti salah satu poin penting dalam kegiatan pengawasan adalah melakukan audit internal, dengan memverifikasi catatan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara komite. Hal ini mengacu pada teori Cormark, yaitu:

Auditing is verification. Auditing is determining that what is intended is what is being performed and, further that what is being performed is appropriate for the task.⁶⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas bahwa peran pengawasan bukanlah mendeskreditkan bagi pelaksana dalam hal ini bendahara komite, akan tetapi pengawasan ini dilakukan demi kesesuaian realisasi yang direncanakan, sehingga pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya tepat sasaran dan bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Hasil temuan yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang pertanggungjawaban dana pendidikan yang bersumber dari orang tua diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016 dibuat oleh bendahara komite berbentuk neraca (buku kas) yang mengacu pada catatan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan laporan, termasuk dalam hal ini bukti kwitansi pengeluaran dana yang tidak terduga.

Bentuk laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh bendahara komite MTs Darul Ulum Palangka Raya menurut peneliti belum memenuhi standar laporan pertanggungjawaban yang komprehensif. Sebab kriteria laporan pertanggungjawaban yang baik seharusnya mampu memberikan informasi pelaksanaan pembiayaan pendidikan, dari segi arus kas keuangan madrasah, perkembangan kegiatan, problem dan kesenjangan dalam kegiatan, dan alternatif pemecahan masalah. Sehingga laporan tersebut mampu memberikan gambaran bagi pimpinan untuk memberikan atau mengeluarkan kebijakan. Hal ini mengacu pada pendapat Matin mengatakan bahwa laporan keuangan harus mampu

⁶⁵Kompri, *Manajemen Sekolah dan Praktek*, Bandung : Al-fabeta, 2014, h. 254.

⁶⁶Rohiat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik Dilengkapi Dengan Contoh Rencana Strategi Dan Rencana Operasional*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h. 21.

menginformasikan kemajuan, perkembangan atau realisasi fisik baik ruin maupun pembangunan dalam suatu periode tertentu.⁶⁷

Berdasarkan pendapat di atas, isi laporan harus dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, materi laporan harus akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan disampaikan tepat waktu. Agar laporan yang disampaikan efektif, maka laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis, disusun dan disajikan dalam bentuk format yang baku. Format laporan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan, mudah digunakan, dan dapat menampung data dan informasi yang penting.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Darul Ulum Palangka Raya sudah dibuat melalui perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak madrasah sebelum dilaksanakan rapat bersama yayasan, komite sekolah dan orang tua, walaupun rancangan anggaran yang dibuat dalam bentuk yang sederhana.

Selanjutnya dalam merealisasi anggaran dan pembukuan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua peserta didik di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016 di lapangan menunjukkan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan RAPBM yang dibuat, dalam arti anggaran telah dibuat pembukuannya/*accounting*.

Pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua peserta didik di MTs Darul Ulum Palangka Raya dilakukan secara langsung oleh kepala madrasah. Pengawasan penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua peserta didik di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016 dibuat dalam bentuk rekapitulasi realisasi secara global, walaupun pembuatan laporan oleh bendahara mengacu pada catatan pengeluaran yang dibuat sebagai bahan laporan, termasuk dalam hal bukti catatan pengeluaran dana tidak terduga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, M., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran*, (Semarang : UNNES, 2013).
- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2006).
- Baihaqi, *Manajemen Pembiayaan pada SMKN Aceh Besar*, *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Volume1, No.2, (November 2012).
- Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. (3rd Edition), (Boston: Allyn and Bacon, Inc.1982)
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV Asy-Syifa, 2000).
- Donni Juni Priansa & Rismi Somad, *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁶⁷Matin, *Manajemen...*, h. 208.

- E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Fatah, Nanang. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Bai Quraisy, 2007).
- Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. *Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Result Through Responsive and Naturalistic Approaches*. (San Fransisco, California: Jossey-Bass Inc., Publishers, 1985).
- Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007).
- Kompri, *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*. (Bandung, CV Alfabeta, 2014).
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. (Jakarta Cet. I, 2014).
- Miles, B.M., & Heiberman, A.M. *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methouds*. (Beverly Hills: Sage Publication, Inc, 1992).
- Rohiat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik Dilengkapi Dengan Contoh Rencana Strategi Dan Rencana Operasional*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010).
- Rohman, Muhammad dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan (Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif)*. (Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2012).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. (Ciputat Cet. I, Lentera Hati, 2000).
- Suhardan, Dadang, dkk. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung, Alfabeta, 2012).
- Sulistiyorini. *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Syamsi, Ibnu. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. (Jakarta: Rosda Karya, 1994).
- Syamsudin, *Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Asahan, Medan, USU, 2009*.
- Terry G.R., *Principles of Management*, Homewood, Richard D Irwin, INC, 1977.
- Yaqin, Husnul. *Kapita Selekt Administrasi dan Manajemen Pendidikan*. (Banjarmasin, Cet. II, Antasari Press, 2011).
- Yin, R.K. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Terjemahan oleh M. Djuazi Mudzakir. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, www.sumberbeasiswa.com-Beasiswa-BSM.html (online 20 September 2016)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008*, tentang pendanaan pendidikan. (2008).
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003* bab XIII pasal 46 ayat 1 tentang Tanggung Jawab Pendanaan.

